

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 1 dan 11

Proyek Rp17 M Mangkrak (1)

Proyek Tak Dikerjakan, Warga Kecewa

Hingga Agustus Belum Dikerjakan

SEMARANG - Ratusan proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan melalui APBD Kota Semarang 2017 hingga Agustus ini belum dikerjakan. Salah satunya proyek infrastruktur di Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara yang telah dianggarkan sebesar Rp 17 miliar. Hal ini menjadi

sorotan DPRD Kota Semarang.

"Hasil reses kami, banyak warga menyampaikan aspirasinya. Di lingkungan setempat sudah menyampaikan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) pada 2016, tapi sampai sekarang belum terealisasi atau belum dikerjakan," kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (16/8). Dia mencontohkan, proyek

pembangunan infrastruktur fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) di Kelurahan Panggung Lor.

"Itu (Perumahan Tanah Mas Panggung Lor, Red) sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang mengenai fasum-fasosnya. *Lha itu kan* setidaknya harus menjadi tanggungjawab (pemkot) mulai tahun 2017, karena sudah mendapatkan

► Baca *Proyek...* hal 11

PROYEK

Sambungan dari hal. 1

anggaran Rp 17 miliar untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Kelurahan Panggung Lor. Tentunya ini angka yang fantastis," ujar Supriyadi.

Dikatakannya, selama ini fasum dan fasos di wilayah Panggung Lor tersebut merupakan tanggungjawab pihak pengembang Perumahan Tanah Mas. Tetapi sejak 2016 lalu, telah diserahkan ke Pemkot Semarang.

"Tentunya ini akan kami evaluasi, dan akan mengundang dinas terkait atas molornya pelaksanaan proyek yang sudah dianggarkan. Serapan anggaran masih sangat kecil. Kami prihatin karena anggaran itu sudah kami sahkan bersama-sama pemerintah, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tetapi justru ditahan-tahan dan belum direalisasikan," katanya.

Jika rencana pembangunan yang sudah dianggarkan tersebut tidak direalisasikan, tentunya akan sangat mengecewakan masyarakat. "Selama ini, kami sudah sering mengingatkan agar proses pelelangan bisa dipersiapkan pada Desember tahun sebelumnya (2016), sehingga Januari (2017) bisa mulai dikerjakan. Ini menjadi catatan kami untuk melakukan evaluasi. Kami akan melakukan pembahasan bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018," ujarnya.

Dikatakan, jika terdapat adanya serapan anggaran tidak maksimal atau tidak lebih dari 50 persen, maka hal itu harus mendapat evaluasi menyeluruh. "Akan kami evaluasi mana yang sekiranya tidak butuh anggaran. Ini merupakan serapan yang buruk mengingat sudah memasuki pertengahan tahun," katanya.

Supriyadi mengaku, hingga saat ini pihaknya menerima informasi baru 75 paket pekerjaan yang telah dilelangkan. "Tentunya masih ada ratusan paket pekerjaan yang belum dilelang, atau masih dalam proses persiapan lelang. Termasuk proyek-proyek penunjukan langsung (PL) masih banyak yang belum direalisasikan. Padahal itu *kan* peruntukannya untuk lingkungan yang sangat ditunggu oleh masyarakat," ujarnya.

Adanya ratusan paket pengerjaan proyek yang belum tersentuh ini menunjukkan bukti bahwa adanya kinerja tidak maksimal. "Artinya, ini menjadi preseden buruk bagi OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Perlunya evaluasi agar ke depan tidak sedemikian buruknya, mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Paling banyak berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang," bebernya.

Selain proyek infrastruktur fasum dan fasos, ratusan proyek infrastruktur lain hingga Agustus

ini juga belum berjalan. Jumlahnya lebih dari 50 persen.

"Tidak hanya proyek infrastruktur besar. Proyek kecil saja, seperti jenis proyek Penunjukan Langsung (PL) sampai sekarang masih banyak yang belum dikerjakan. Saya sebetulnya pesimis, karena ini akan berdampak tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Red) maupun hasil proyek yang tidak maksimal. Saya melihat adanya *progres* kinerja yang tidak bagus," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso, belum lama ini.

Dikatakannya, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran APBD 2017 di Kota Semarang, seharusnya sudah ada evaluasi untuk satu semester ini. "Tapi, sampai sekarang belum ada evaluasi, seberapa jauh kegiatan OPD berkaitan program pembangunan infrastruktur? Terutama di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), ini banyak sekali lelang-lelang yang seharusnya dimulai awal 2017, tapi justru baru terlaksana lelangnya pada pertengahan tahun," bebernya.

Menurut Joko, dampak keterlambatan lelang, secara otomatis menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek dan berdampak pada kualitas proyek. "Kenapa berpengaruh terhadap kualitas proyek, karena waktu pengerjaannya sudah mepet, tentunya dia (kontraktor) akan dikejar-kejar oleh waktu dan aturan yang ada. *Nah* itu akan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 1 dan 11

Proyek Rp17 M Mangkrak (2)

Proyek Tak Dikerjakan, Warga Kecewa

mengakibatkan kualitas proyek menjadi jelek," jelasnya.

Joko mencontohkan sejumlah proyek jembatan belum dikerjakan, proyek Jalan Inspeksi 2018 harus selesai, tapi sampai sekarang belum ada yang menyentuh. "Padahal ini sudah bulan apa? Masih banyak yang lainnya,

hampir 50 persen proyek secara keseluruhan belum dikerjakan. Selain proyek besar pembangunan Pasar Johar, juga ada proyek sirkuit di Mijen yang belum ada perkembangan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminudin,

menyebutkan, saat ini di Dinas PU mengerjakan sebanyak 87 proyek. Mengenai adanya kemungkinan pelaksanaan proyek yang tidak selesai tepat waktu atau molor, pihaknya akan tetap mengacu kepada aturan. Tentunya ada sanksi yang diberlakukan. "Tentu ada sanksi,

misalnya kami *blacklist*. Tapi, saya kira untuk saat ini belum saatnya untuk masalah itu (sanksi), karena masih dalam proses percepatan pengerjaan. Tapi, kalau nanti pada Desember pekerjaan tidak selesai, baru bicara (sanksi *blacklist*) itu," ujarnya. (amu/aro)

Proyek Pemkot yang Tersendat

- ◆ Baru 75 paket proyek yang dilelang.
- ◆ Proyek belum berjalan paling banyak di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- ◆ Kinerja Kepala OPD dinilai tidak maksimal.
- ◆ Dewan akan melakukan evaluasi serapan anggaran.

GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG